

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan salah satu di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai utara Jawa. Kota ini berjarak 101 km disebelah barat Kota Semarang dan 384 km di sebelah timur Kota Jakarta. Julukan Kota Batik sering disematkan pada Kota Pekalongan, karena sejarah yang menyebutkan bahwa sejak puluhan tahun yang lalu, sebagian besar masyarakatnya telah bekerja di sektor industri batik rumahan. Industri batik telah menjadi bagian dari penghidupan masyarakat Kota Pekalongan dan tetap eksis mengikuti perkembangan zaman.

Secara geografis, luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 km² dengan jarak terjauh dari wilayah barat ke timur 7 km dan wilayah utara ke selatan 9 km. Kota Pekalongan terbagi dalam 4 kecamatan yakni Kecamatan Pekalongan Timur, Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Selatan. Dari keempat kecamatan ini tersebar 27 kelurahan. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu di sebelah utara berada di perbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang, sebelah barat dengan Kabupaten Pekalongan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang (pekalongankota.go.id, <https://pekalongankota.go.id/halaman/geografi.html>, akses 5 Januari 2024).



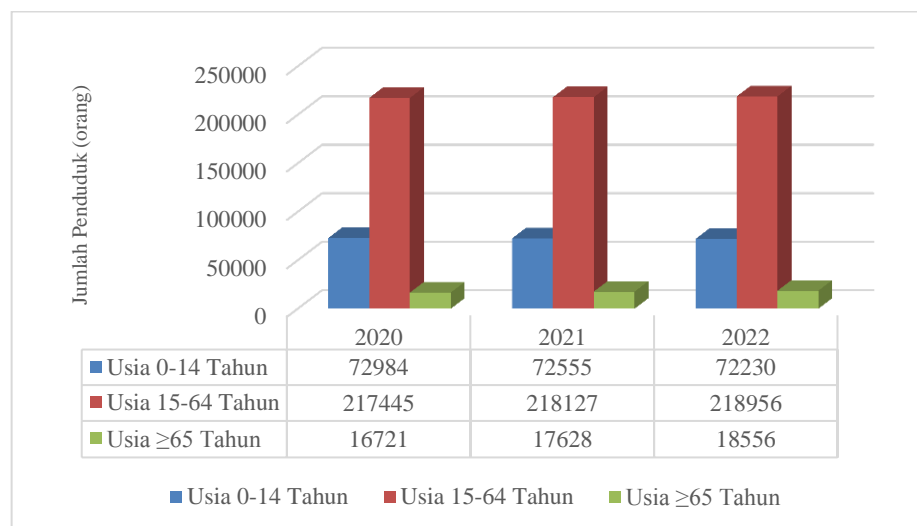
Gambar 2.1. Batas Wilayah Kota Pekalongan
Sumber: pekalongankota.go.id

2.1.1. Demografi

BPS Kota Pekalongan (BPS Kota Pekalongan, 2023a) memproyeksikan jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2022 mencapai 309.742 jiwa yang terdiri dari 156.391 jiwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 153.351 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan jenis kelamin, dapat dinyatakan bahwa rasio jenis kelamin di Kota Pekalongan adalah sebesar 102,39. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 102 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Di Kota Pekalongan, tingkat kepadatan penduduk terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduknya. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalongan Barat yakni 9.436 jiwa per km², sedangkan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pekalongan Utara yaitu sebesar 5.267 jiwa per km².

Berdasarkan kelompok usia, pada tahun 2022 sebanyak 218.956 jiwa (70,7%) masuk ke dalam kategori usia produktif (usia 15-64 tahun), sedangkan

90.786 jiwa (29,3%) masuk dalam kategori usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif ini terdiri dari 72.230 jiwa (23,3%) yang belum produktif dan 18.556 jiwa (6,0%) yang sudah tidak produktif. Berdasarkan data tersebut, struktur penduduk Kota Pekalongan termasuk dalam kategori konstruktif yang mana jumlah penduduk dengan usia produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tua. Diketahui bahwa pada tahun 2022, rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) Kota Pekalongan adalah 41,46% (BPS Kota Pekalongan, 2023a).



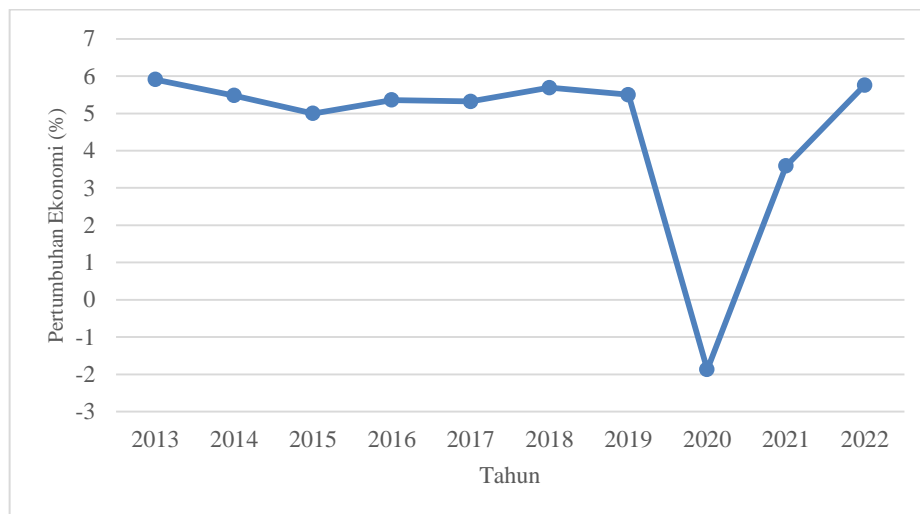
Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Kota Pekalongan per Kelompok Usia
 Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021-2023 (telah diolah kembali)

Berdasarkan diagram tersebut, kelompok usia penduduk Kota Pekalongan tahun 2020-2023 terbanyak ada pada rentang usia 15 sampai 64 tahun, yang mana pada usia tersebut merupakan usia produktif. Hal ini dapat diartikan bahwa Kota Pekalongan memiliki potensi sumber daya manusia yang besar karena banyaknya jumlah penduduk usia produktif. Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan menyebutkan bahwa bonus demografi sangat menguntungkan. Adapun yang

dilakukan Dinperinaker untuk memanfaatkan keuntungan ini adalah dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan keterampilan kerja kepada para angkatan kerja. Dengan semakin banyak dilakukan pelatihan kepada angkatan kerja, harapannya mereka tidak hanya memanfaatkan kesempatan kerja yang terbuka tetapi juga menjadi faktor penentu agar ekonomi dapat tumbuh menjadi lebih baik. Pada intinya, Dinperinaker memberikan pengarahan, meningkatkan kompetensi kerja para angkatan kerja supaya mereka dapat lebih produktif menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai, kegunaan, dan manfaat bagi pembangunan pada umumnya dan bagi perekonomian pada khususnya.

2.1.2. Sosial Ekonomi

Pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis yakni sebesar -1,87%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 5,5%. Sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi, roda perekonomian pun kembali berjalan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 5,76%. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2021 sebesar 3,59% akibat adanya pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Pekalongan (pekalongankota.bps.go.id, <https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/52/241/1/laju-pertumbuhan-pdrb.html>, akses 5 Januari 2024).



Gambar 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2013-2022

Sumber: Website BPS Kota Pekalongan

Kota Pekalongan sering disebut sebagai Kota Batik. Hal ini dikarenakan sejarah yang mengatakan bahwa produksi batik banyak berkembang dari industri rumahan sejak ratusan tahun yang lalu sehingga telah melekat erat pada kehidupan masyarakatnya. Letaknya yang berada di tengah perlintasan jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) menjadikan kota ini dinilai strategis dan berpotensi besar dalam sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Sementara itu, dalam sistem pengembangan wilayah provinsi, Kota Pekalongan ditetapkan sebagai bagian inti dari kawasan Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan ini diharapkan akan menjadi kawasan yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan (pekalongankota.go.id, <https://pekalongankota.go.id/halaman/geografi.html>, akses 5 Januari 2024).

Sebutan Kota Pekalongan sebagai “*World City of Batik*” menggambarkan suatu kota yang kaya budaya dan tradisi serta kehangatan dan keramahan masyarakatnya. Di kota ini, terdapat ribuan industri batik yang berkembang di

seluruh penjuru kota. Batik telah menjadi salah satu sumber penghidupan yang besar bagi masyarakat. Bahkan berkat kerajinan batik yang berkembang pesat menjadikan Kota Pekalongan dinobatkan sebagai Kota Kreatif Dunia bersama 27 kota lain di dunia pada tahun 2014 oleh UNESCO ([kompaspedia.kompas.id, https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-pekalongan-geliat-sentra-batik-dan-perdagangan-di-pesisir-pantura](https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-pekalongan-geliat-sentra-batik-dan-perdagangan-di-pesisir-pantura), akses 5 Januari 2024). Khusus untuk industri batik ini terdapat sentra-sentra yang digunakan untuk mengembangkan industri batik, seperti Pasar Grosir Batik Setono, Kampong Batik Kauman, Kampung Canting Landungsari, Kampung Wisata Batik Pesindon, Sentra Kain Tenun dengan alat tenun bukan mesin di Medono, serta terdapat Museum Batik yang memamerkan berbagai macam motif batik khas Kota Pekalongan.

Selain industri batik, banyak juga masyarakatnya yang bekerja di sektor perikanan. Terdapat banyak perusahaan besar maupun industri rumahan yang mengolah hasil tangkapan laut seperti ikan asin, kerupuk ikan, ikan asap, sarden, terasi. Selain itu, Kota Pekalongan juga memiliki pelabuhan yang dijadikan tempat transit dan pelelangan hasil tangkapan laut oleh banyak nelayan dari berbagai daerah. Wilayah pantainya yang luas juga menjadikan kota ini memiliki banyak destinasi wisata pantai, seperti Pantai Pasir Kencana, Pantai Boom, Pantai Slamaran Indah, dan Pantai Sari.

Jumlah penduduk bekerja di Kota Pekalongan pada tahun 2022 adalah sebanyak 161.470 orang. Adapun jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan minum

yakni sebesar 37,11% (59 ribu orang). Kemudian disusul sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 34,71% (56 ribu orang), sektor jasa-jasa (meliputi jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial) sebesar 16,96% (27 ribu orang), sektor lainnya sebesar 9,23% (14 ribu orang), serta sektor yang paling sedikit dalam penyerapan tenaga kerja adalah pertanian yaitu sebesar 1,98% (3 ribu orang) (BPS Kota Pekalongan, 2023).

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022

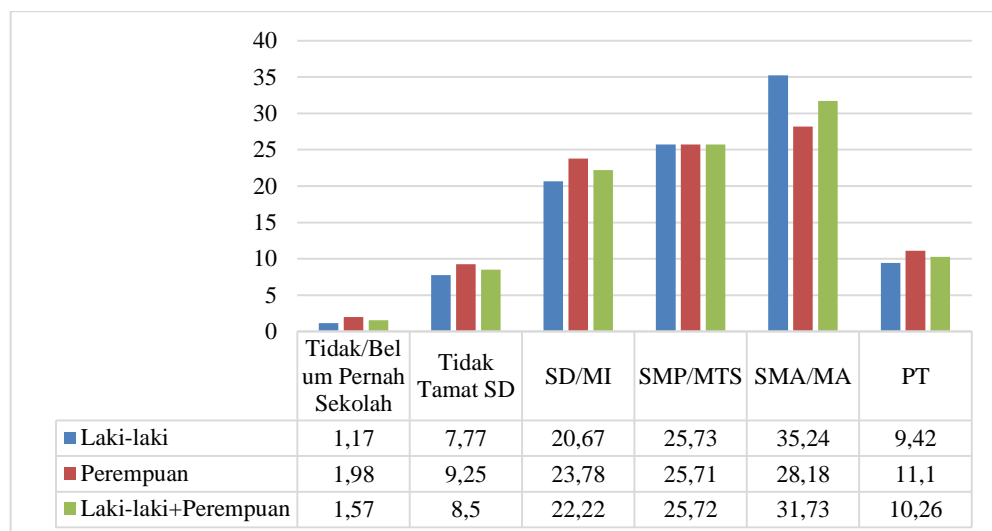
Lapangan Pekerjaan Utama		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,05	0,49	1,98
2	Industri Pengolahan	34,16	35,48	34,71
3	Perdagangan Besar dan Eceran; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,58	43,42	37,11
4	Jasa-jasa	15,50	18,99	16,96
5	Lainnya	14,71	1,61	9,23
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: *Profil Ketenagakerjaan Kota Pekalongan (2023)*

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk di daerah dapat dilihat dari PDRB per kapitanya, yang dihasilkan dari hasil bagi antara nilai tambah oleh seluruh kegiatan perekonomian daerah dengan jumlah total penduduk di daerah. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menghasilkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Adapun PDRB Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022. Di tahun 2018 tercatat nilai PDRB per kapita sebesar 33,118 juta. Nilai ini terus meningkat hingga pada tahun 2022 sebesar 40,679 juta. Namun, di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan

akibat pandemi Covid-19 yaitu sebesar 35,360 juta (BPS Kota Pekalongan, 2023a).

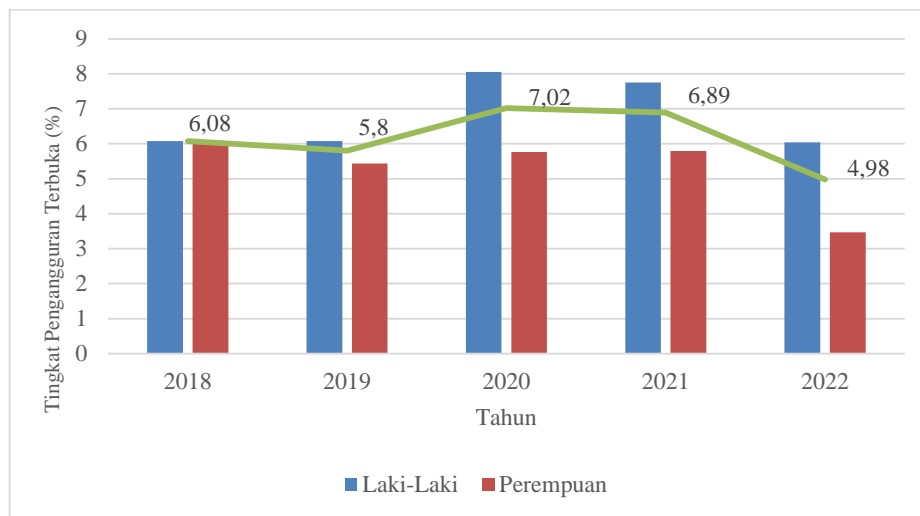
Kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang diselesaikan. Tingkat pendidikan ini mempengaruhi kualitas dari SDM yang ada di daerah, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang diselesaikan masyarakat, maka akan semakin tinggi kualitas SDM yang dihasilkan. Hal ini tentunya akan memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat. Dalam data BPS disebutkan bahwa mayoritas penduduk Kota Pekalongan adalah tamatan SMA/MA/Sederajat yang jumlahnya sebanyak 75 ribu orang (31,73%). Kemudian di posisi kedua adalah tamatan SMP/MTS/Sederajat sebanyak 61 ribu orang (25,72%). Posisi ketiga dan keempat adalah SD sebanyak 52 ribu orang (22,22%) dan Perguruan Tinggi hanya sebanyak 24 ribu (10,26%). Adapun yang tidak tamat SD sebanyak 20 ribu orang (8,5%) dan yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 3 ribu orang (1,57%) (BPS Kota Pekalongan, 2023).



Gambar 2.4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022
Sumber: Profil Pendidikan Kota Pekalongan 2022 (2023)

Tumbuhnya laju pertumbuhan ekonomi pasca pandemi tidak menjamin akan menghilangkan permasalahan pengangguran. Kota Pekalongan tetap memiliki permasalahan terkait dengan banyaknya pengangguran. Menurut Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, banyak sebab terjadinya pengangguran. Pertama, para angkatan kerja yang menganggur tidak dapat mengakses kesempatan kerja artinya tidak memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja. Kemungkinan lainnya memang lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerap semuanya.

TPT Kota Pekalongan pada tahun 2020 mencapai 7,02% atau sebanyak 11 ribu orang dari 157 ribu angkatan kerja (BPS Kota Pekalongan, 2021). Angka ini lebih tinggi dari TPT provinsi Jawa Tengah yakni hanya sebesar 6,48% atau sebanyak 1,2 juta orang dari 18,7 juta angkatan kerja. Adapun pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 6,89% atau sebanyak 12 ribu dari 181 ribu angkatan kerja. Tren positif terjadi pada tahun 2022 yakni TPT Kota Pekalongan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4,98% atau sebanyak 8 ribu dari 169 ribu angkatan kerja. Turunnya TPT ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan yang semakin membaik pasca pandemi, sehingga kesempatan kerja pun semakin terbuka.



Gambar 2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin 2018-2022

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021-2023 (telah diolah kembali)

Menurut Sri Budi Santoso, dalam rangka mengatasi pengangguran yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan keterampilan kerja para angkatan kerja, kemudian disaat yang sama juga pemerintah menjembatani antara para pencari kerja dengan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Disebutkan juga bahwa sekarang sudah banyak diadakan *jobfair-jobfair* yang mampu mempertemukan para para pencari kerja dengan perusahaan-perusahaan. Dinperinaker selalu menginformasikan lowongan-lowongan kerja melalui papan pengumuman dan media sosial. Hadirnya Program Kartu Prakerja diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Pekalongan. Adanya pelatihan-pelatihan yang disediakan dalam program dinilai mampu meningkatkan keterampilan para pencari kerja.

2.2. Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

Kartu Prakerja merupakan program yang diatur dalam Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Program ini dilaksanakan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan daya saing bagi angkatan kerja. Perpres No. 36 Tahun 2020 ditetapkan pada 26 Februari 2020, kemudian diundangkan di Jakarta pada 28 Februari 2020. Ditetapkannya perpres tersebut berawal dari gagasan Presiden Jokowi pada tahun 2019 yaitu ingin memberikan pelatihan secara gratis bagi para pencari kerja melalui Program Kartu Prakerja. Mulanya, program ini dirancang dengan metode pelatihan tatap muka atau offline. Namun setelah merebaknya virus Covid-19, pemerintah mengubah skema pelatihan menjadi pelatihan *online*.

Dalam perkembangannya, peraturan tentang Program Kartu Prakerja ini mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama tertuang dalam Perpres No. 76 Tahun 2020 dan perubahan kedua tercantum dalam Perpres No. 113 Tahun 2022. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 7 Juli 2020. Dalam perubahan pertama, pemerintah menambahkan tujuan program yang mulanya hanya untuk pengembangan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja, kemudian ditambahkan untuk pengembangan kewirausahaan. Dalam perubahan pertama tersebut juga ditambahkan rincian orang-orang yang tidak dapat mengikuti program. Adapun perubahan kedua yaitu tercantum dalam Perpres No. 113 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2022. Dalam

peraturan tersebut pada Pasal 12B disebutkan bahwa Program Kartu Prakerja pada tahun 2022 tidak lagi bersifat bansos. Pulihnya perekonomian pasca pandemi menjadikan pemerintah mengubah skema Program Kartu Prakerja menjadi skema normal.

Perpres Nomor 36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi”. Program ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta pengembangan kewirausahaan. Adapun manfaatnya adalah untuk manfaat pelatihan dan insentif. Program Kartu Prakerja hanya dapat diikuti oleh warga negara yang berumur 18 tahun hingga 64 tahun yang tidak sedang menempuh pendidikan formal. Dalam Perpres No. 76 Tahun 2020, disebutkan “Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada: pejabat negara; Pimpinan dan Anggota DPRD; ASN; Prajurit TNI; Anggota Polri; Kepala Desa dan perangkat desa; dan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN atau BUMD”. Selain itu, dalam satu Kartu Keluarga (KK) hanya dibolehkan maksimal 2 anggota keluarga yang boleh mendaftar Program Kartu Prakerja.

Adapun tentang cara mendaftar program disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 4 Perpres Nomor 36 Tahun 2020 bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis Pelatihan, dan pemanfaatan Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di

bidang perekonomian”. Berdasarkan PERMENKO No. 3 Tahun 2020 pasal 3 menyebutkan, “Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada program melalui situs resmi Program Kartu Prakerja secara daring. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui instansi pemerintah di daerah”. Setiap pendaftar wajib memasukkan data diri seperti nama lengkap, tanggal lahir, NIK, alamat rumah, email, dan pendidikan terakhir. Selain itu, pendaftar juga diwajibkan mengunggah swafoto bersama dengan KTP. Setelah pengisian data diri, dilakukan verifikasi oleh Manajemen Pelaksana.

Dalam menjalankan program, pemerintah bekerja sama dengan platform digital. Dalam Pasal 1 Perpres No. 36 tahun 2020 disebutkan, “Platform digital adalah mitra resmi Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan layanan lainnya yang berbasis internet”. Hingga saat ini, ada tujuh platform digital yang menjadi mitra Kartu Prakerja yaitu Tokopedia, Bukalapak, Sisnaker, Sekolahmu, Pintaria, Pijarmahir dan Maubelajarapa. Dalam platform-platform ini terdapat berbagai macam lembaga pelatihan dengan bidang yang berbeda. Jenis pelatihannya berupa keterampilan praktis jangka pendek yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, misalnya teknik, penjualan dan pemasaran, informasi dan teknologi, perkantoran, bahasa, *lifestyle*, makanan dan minuman, perbankan dan jasa keuangan, pertanian, dan industri kreatif.

Setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan pada platform digital, peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan sebagai bukti keterampilan dalam bidang tertentu. Sertifikat ini akan berguna untuk mempermudah peserta program memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu,

peserta juga akan menerima insentif pasca pelatihan sebanyak Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dan survei sebanyak 3 kali masing-masing Rp50.000. Namun pada tahun 2023 terjadi perubahan skema program dari semi bansos ke normal. Hal ini menjadikan perubahan insentif menjadi Rp600.000 yang hanya dibayarkan sekali dan insentif survei sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp50.000. Pada saat pelaksanaan skema normal, anggaran lebih banyak digunakan untuk pagu pelatihan yaitu sebesar Rp3.500.000 dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya sebesar Rp1.000.000.

Pelaksanaan operasional Program Kartu Prakerja dilakukan oleh Manajemen Pelaksana. Disebutkan dalam Pasal 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2020, “Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja”. Mengutip dari website resmi Kartu Prakerja (Prakerja.go.id., <https://www.prakerja.go.id/tanya-jawab/tentang-kartu-prakerja>, akses 10 Maret 2024), “Manajemen Pelaksana Program (*Project Management Office* disingkat PMO) sebagai unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja dan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang akan melaksanakan operasional Kartu Prakerja. Semua kebijakan Kartu Prakerja dirumuskan oleh Komite Cipta Kerja yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Staf Kepresiden sebagai Wakil Ketua, terdiri dari 12 menteri dan kepala lembaga sebagai anggota dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretaris Komite”.

Kartu Prakerja merupakan program terpusat yang mana lebih banyak dijalankan oleh pemerintah pusat. Namun, didalam peraturan tertulisnya

mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk turut serta mendukung Program Kartu Prakerja. Dalam Pasal 28 Perpres No. 36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Peran Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
 - c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.
- 2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan:
 - a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah.
- 3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Program Kartu Prakerja memang lebih banyak dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana di pusat. Namun, dalam rangka menyukseskan program dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah

melalui dinas terkait diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program sesuai dengan yang diamanahkan pada Perpres No. 36 tahun 2020 tersebut.